



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2018 – 2019
Masa Sidang : III
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.25 WIB s.d 18.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : 1. Membahas mengenai pemberlakuan Permenhub PM No. 88
Tahun 2014 dan Permenhub PM No. 104 Tahun 2017;
2. Membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam
menyelenggarakan kontrol navigasi di wilayah udara Indonesia
(FIR) yang saat ini masih berada dalam kendali Singapura; dan
3. Membahas penghapusan bagasi cuma-cuma (*Free Baggage
Allowance*) Maskapai Lion Air dan Wings Air
Ketua Rapat : Ir. Sigit Sosiantomo
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota : dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Sekjen, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat,
Kepala KNKT, Dirut Airnav beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Kepala KNKT, Dirut Airnav pada hari ini adalah membahas mengenai pemberlakuan Permenhub PM No. 88 Tahun 2014 dan Permenhub PM No. 104 Tahun 2017; membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan kontrol navigasi di wilayah udara Indonesia (FIR) yang saat ini masih berada dalam kendali Singapura; dan membahas penghapusan bagasi cuma-cuma (*Free Baggage Allowance*) Maskapai Lion Air dan Wings Air.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan Kepala BPWS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

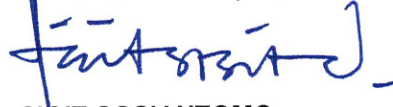
1. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang besaran komponen terkait tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna memformulasi ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengenai kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan kontrol navigasi di wilayah udara Indonesia/*Flight Information Region* (FIR) yang saat ini masih berada dalam kendali Singapura. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pengambilalihan pengelolaan ruang udara tersebut dari Singapura.
4. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengenai pemberlakuan Permenhub - PM No. 88 Tahun 2014 tentang tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan di Lintas Merak – Bakauheni, dan Permenhub - PM No. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengkaji ulang pemberlakuan ketentuan tersebut guna memberikan iklim kondusif dalam bisnis pelayaran dan memajukan industri angkutan nasional sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

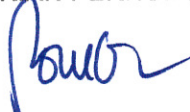
Jakarta, 29 Januari 2019

KETUA RAPAT,



SIGIT SOSIANTOMO

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



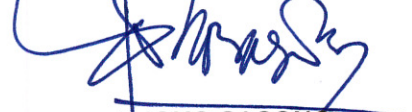
POLANA B. PRAMESTI

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



BUDI SETIYADI

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



DJOKO SASONO